

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik identitas adalah sebuah strategi dan kontestasi ikatan simbol kultur primordial berbasis agama, ras, suku dan kelompok dalam memperjuangkan siapa, mendapatkan apa, bagaimana dan kapan. Agnes Heller mendefinisikan politik identitas adalah strategi politik yang memfokuskan pada perbedaan dan pemanfaatan primordial sebagai kategori utamanya. Menurutnya, pada sisi tertentu politik identitas dapat menghadirkan toleransi dan kebebasan tetapi pada sisi lain bisa memunculkan intoleransi kekerasan verbal-fisik dan pertentangan etnik dalam kehidupan bersama.¹

Politik diferensiasi (perbedaan) merupakan nama lain dari politik identitas dan biopolitik dimana Michel Foucault memandang politik identitas sebagai perbedaan yang telah termaktub dalam mikropolitik (dalam pengertian politik wacana dan bipolitik).² Wacana politik perbedaan bukan hal baru. Wacana tersebut telah diperbincangkan oleh kaum feminis dan dekonstruksionis dengan asumsi filsafat yang berbeda dan berujung pada diskusi mendalam di kalangan *American Philosophical Association*. Dan jauh sebelum itu diskursus seputar politik perbedaan berfokus pada perbedaan kultur yang masih berkorelasi dengan gagasan para filsuf seperti Hegel, Marx, Kierkegaard, Sartre dan Beauvoir yang juga menekankan realitas perbedaan dalam sosial, politik, seksualitas dan filsafat.³

¹ Ubed Abdilah S. *Politik Identitas Etnis*, (Magelang: Indonesiatara; 2002), hlm. 16

² Gustiana Kambo, *Politik Identitas Etnik*, (Makasar: Unhas Press, 2021), hlm. 19

³ Hugh J. Silverman, *Writing the Politics of Difference*, (New York: Albany, 1991), hlm. IX

Politik perbedaan secara mutlak menuntut adanya pengakuan antara individu dan kelompok. Bentuk politik ini menjadi gerakan baru dalam berpolitik dan berelasi dimana hak-hak harus dipertahankan bukan karena kesamaan melainkan perbedaan antara individu dan kelompok. Di sini letak titik fokus, pengakuan menjadi titik temu antara perbedaan. Pengakuan yang ada mengafirmasi perbedaan sekaligus menuntut nilai kesamaan di hadapan publik supaya perbedaan tidak terjebak dan melahirkan diskriminasi.⁴

Awalnya politik perbedaan muncul di Kanada, digagas oleh Charles Taylor. Fokus utama dari gagasannya adalah pentingnya pengakuan dan penghormatan individu dan kelompok sesuai keunikan spesifik mereka. Bagi Taylor pengakuan merupakan sebuah bentuk penghargaan atas perbedaan dari yang lain, karena itu adalah bagian dari kebutuhan vital.⁵ Perbedaan-perbedaan yang harus diakui meliputi etnik, agama, ras dan lain-lain yang digunakan untuk merangkul orang atas dasar perbedaan yang mereka miliki.

Iris Marion Young sebagai filsuf politik dan feminis asal Amerika juga hadir dengan perspektif yang kurang lebih sama. Namun bagi Young pengakuan tidak bersifat eksklusif. Pengakuan harus bersifat transformatif dan emansipatoris. Karena itu keberadaan dari individu atau kelompok harus mampu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Pengakuan terhadap keunikan penting jika disandingkan dengan penegasan akan kesamaan dalam partisipasi. Jadi bagi Young pengakuan akan keunikan menuntut penerapan konsep egalitarianisme dan diferensiasi sekaligus dalam politik. Artinya resep untuk menyelesaikan persoalan individu atau kelompok tertindas bukan dengan memperlakukan mereka secara sama. Keunikan masing-

⁴ Ratna Ghosh dan Ali A. Abdi, *Education and the Politics of Difference*, (Canada: Canadian Scholars' Press Inc., 2004), hlm. 170

⁵ S. Aminah dan Roikan, *Pengantar metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group 2019), hlm. 135

masing menuntut perlakuan yang berbeda-beda dengan tujuan utamanya adalah membongkar ideal asimilasi represif yang memaksa orang untuk beradaptasi dalam kultur dominan dan meninggalkan kulturnya.⁶ Dan perlakuan yang adil bagi Young berawal dari mengakui perbedaan dan kekhasan masing-masing.

Dalam ranah kehidupan politik, setiap orang dan setiap kelompok dengan latar belakang yang berbeda mengupayakan ideal keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya sesuai visi-misi. Upaya-upaya tersebut terjadi dalam lingkup yang berbeda-beda dan mengarah pada tujuan yang beragam pula. Demikian hal keadilan dan hak istimewa yang diperjuangkan oleh filsuf sosialis-feminis asal Amerika Serikat (AS) Iris Marion Young, dengan berpatokan pada kenyataan politik secara nasional dan internasional. Dia mengkritisi metafisika patriarkis, substansi keadilan dan soal praktek demokrasi yang notabene tumpang tindih di Amerika Serikat.⁷

Young hadir untuk mengkritisi dominasi dan penindasan yang sudah “membudaya”. Praktek yang telah dinormalisasi dengan hukum dan kebiasaan-kebiasaan dianggap masuk akal. Dalam hal ini, kaum minoritas (orang kulit hitam, Amerika-Indian, kau perempuan, *gay*, dan lesbian) tidak diperhitungkan dan tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam politik publik.⁸ Melalui politik perbedaan Young menegaskan bahwa penting untuk menegakan keadilan melalui jalur pengakuan mutlak akan setiap individu dan kelompok dengan segala keunikan dan keterbatasan mereka.

Asumsi dasar konsep politik perbedaan lahir dengan konteks yang kurang lebih demikian; Bahwasannya semua manusia lahir dengan keistimewaannya sebagai pribadi yang unik dan eksis

⁶ Otto Gusti Madung, *Politik Diferensiasi versus Martabat Manusia Universal*, (Maumere: Ledalero, 2011), hlm. 10

⁷ Iris Marion Young, *Responsibility for Justice*, (New York: Oxford, 2011), hlm. xiii

⁸ Jacob T. Lecy and Iris Marion Young, *Colonialism and Its Legacies*, (New York: Lexington Books, 2011), hlm. 34

di tengah sesamanya. Keistimewaan ini serentak memberi ruang untuk berpartisipasi secara penuh dengan segala keterbatasannya. Keterbatasan tersebut semestinya diakui dan diperlakukan secara istimewa pula sehingga eksistensinya terus diperhitungkan, dan dengan sendirinya kesetaraan dapat dikokohkan. Keistimewaan tersebut datang dari dua polemik dasariah yakni polemik martabat universal dan autentisitas, pengakuan (*recognition*).⁹

Politik diferensiasi berkembang dengan klaim kaum feminis, anti-rasis, dan pembebasan bagi kaum minoritas dan para *gay* dengan berargumen bahwa ketidaksetaraan struktural gender, ras dan seksualitas tidak selaras dengan pemahaman kesetaraan dan inklusi. Sebagaimana digambarkan oleh liberalisme bahwa penting untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan dengan membutuhkan non-diskriminasi; menerapkan prinsip evaluasi dan distribusi yang sama kepada semua orang tanpa memandang posisi atau latar belakang sosial-budaya. Jadi keadilan sosial bagi kaum liberal adalah dengan mengutamakan kesamaan dan mengabaikan perbedaan gender, rasa atau budaya.

Young dalam karyanya *Democracy inclusion*, menantang konsep kesetaraan yang digambarkan oleh kelompok liberal. Argumen Young adalah bahwa ideal ekualitas dan perlakuan yang sama berdasarkan kemanusiaan bersama semata-mata norma universalisme baratsentris dan androsentris dan cenderung mengarah ke asimilasi. Young menginginkan sebuah perlakuan yang penuh respek terhadap perbedaan serta solidaritas yang memperjuangkan kesetaraan dalam perbedaan baik sosial kultural maupun politik.¹⁰ Maksud Young adalah bukan untuk menghilangkan perbedaan. Sebaliknya, menonjolkan perbedaan dan saling menghormati dengan

⁹ Otto Gusti Madung, *Ip., Cit.*, hlm. 12

¹⁰ Iris Marion Young, *Inclusion and Democracy*, (New Work: Oxford, 2000), hlm. 18

maksud menciptakan suatu masyarakat yang heterogen merelatifkan universalisme budaya dominan dan memungkinkan dialog yang inklusif secara demokratis.

Tujuan pokok dari politik perbedaan yang disandingkan dengan demokrasi inklusi dalam mempertimbangkan keadilan adalah menuntut adanya pengakuan publik atas perbedaan dan kesamaan, dan dalam persetujuan untuk saling menghormati tidak dapat direduksi. Dengan demikian jaminan keadilan dapat terpenuhi dan hak setiap pribadi dan kelompok dapat diteguhkan. Artinya keistimewaan dan kenuikan dalam otonomi pribadi yang bersifat relasional selalu diakui secara mutlak dengan tetap mengharmoniskan norma yang ada demi keadilan itu sendiri.

Dalam *opus Magnum*-nya, keadilan dan politik perbedaan, diferensiasi (*Justice and Politics of Difference*) terungkap maksud utama dari Young. Pertama-tama Young bermaksud untuk merumuskan kembali bagaimana konsep dan fakta perbedaan dalam hubungan institusional dan intersubjektif beserta konsekuensinya dapat dipahami dalam konteks sosial-budaya tertentu. Bagi Young perbedaan dapat mengungkapkan variabilitas yang mengandung makna dalam hubungan dan perbandingan antara-kelompok dan intra-kelompok. Young berargumen demikian:

“The politics of difference confronts this fear, and aims for an understanding of group difference as indeed ambiguous, relational, shifting, without clear borders that keep people straight—as entailing neither amorphous unity nor pure individuality”¹¹

Young menekankan konsep solidaritas, perasaan setia kawan. Sikap solider mengandaikan adanya sportivitas dan sensitivitas, agar orang tulus mengakui keberadaan kelompok lain. Idealnya solidaritas dapat menghapuskan *gap* dan mengatasi batas-batas, baik batas konseptual maupun batas spasial.

¹¹ Iris Marion Young, *Justice and Politics of Difference*, *Op. Cit.*, hlm. 171. Politik perbedaan menghadapi ketakutan tersebut, dan bertujuan untuk memahami perbedaan kelompok sebagai hal yang ambigu, relasional, bergeser, tanpa batas yang jelas yang membuat orang tetap searah dengan tidak memerlukan kesatuan amorf maupun individualitas murni

Young juga membuat diferensiasi budaya dan struktural. Setiap kelompok budaya memiliki kekhasan dan kekayaan ritual dan konseptual yang dapat mempersatukan masyarakat. Kelompok-kelompok budaya disatukan oleh bahasa, praktek sehari-hari, bentuk pergaulan, konvensi estetika dan agama, dan sebagainya. Hal-hal ini menawarkan kepada anggotanya sarana ekspresi dan komunikasi tertentu yang menciptakan lingkungan kedekatan dan persatuan. Sedangkan tentang struktur sosial, Young jelaskan sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki posisi yang berbeda dalam hubungan interaktif dan institusional yang mengkondisikan prospek dan peluang dalam hidup mereka.¹² Contoh perbedaan struktural yang ditawarkan oleh Young adalah hubungan yang didasarkan pada jenis kelamin, ras, kelas, seksualitas, kecacatan, dan sebagainya. Terutama perbedaan yang berkaitan dengan aspek fisik atau psikologis dan status sosial.

Benar adanya, setiap orang dan setiap kelompok memiliki martabat. Martabat harus dihargai dan dijunjung sesuai keyakinan masing-masing. Di samping itu ada pula kebenaran luhur yang harus diindahkan dengan kolaborasi konstruktif demi kelangsungan. Demikian halnya kelompok minoritas yang hadir di tengah mayoritas. Keberadaan mereka mutlak diakui dan mendapatkan perlakuan yang wajar dengan respek.¹³ Hal itu akan memungkinkan rasa keadilan, dan *datum* keadilan dapat mendarat. Dan Young benar pada taraf ini, berusaha dalam memperjuangkan martabat keunikan dan perlakuan yang adil.

Hal keadilan merupakan bagian fundamental dari manusia. Keadilan menjadi sebuah aspek yang harus diperjuangkan demi otonomi pribadi dan relasional. Artinya kehadiran seorang pribadi dan sebuah kelompok di tengah masyarakat majemuk memiliki nilai tersendiri. Nilai tersebut

¹² Iris Marion Young, *Inclusion and Democracy*, *Op. Cit.*, hlm. 91

¹³ Jacob T. Lecy and Iris Marion Young, *Op. Cit.*, hlm. 157

diekspresikan dalam keunikan dan perbedaan. Melalui pengakuan dan perlakuan yang wajar sebagaimana dikonsepsikan oleh Young keadilan dapat dimungkinkan sesuai konteks.

Berlandaskan pada konsep di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh pemikiran dari Iris Marion Young tentang politik diferensiasi yang berbasis pada keadilan ini dengan judul **“KONSEP POLITIK DIFERENSIASI MENURUT IRIS MARION YOUNG”**

1.2 Perumusan Masalah

Agar mempermudah peneliti selanjutnya dan dengan berangkat dari latar belakang pemikiran di atas penulis mencoba merumuskan beberapa pokok persoalan atau pertanyaan sebagai titik acuan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

1. Apa itu konsep *Politik Diferensiasi* Iris Marion Young?
2. Bagaimana Latar belakang *Politik Diferensiasi*?
3. Bagaimana penerapan konsep *Politik Diferensiasi* dalam kehidupan bermasyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah anata lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang konsep *Politik Diferensiasi* menurut Iris Marion Young.
2. Untuk mengetahui tentang latar belakang lahirnya konsep *Politik Diferensiasi*.
3. Untuk menjelaskan penerapan konsep *Politik Diferensiasi* dalam realitas kehidupan masa kini.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Masyarakat

Sangat diharapkan bahwa dengan penelitian kecil ini masyarakat dapat memahami kehadiran setiap individu dan kelompok dengan segala keunikan dan keistimewaan mereka di zaman ini. Dan melalui pemahaman mendetail mengenai hakikat kemanusiaan dan partisipasi dalam dalam ruang public, setiap individu dan kelompok dapat di-valorisasi sebagai manusia-manusia yang bernilai dan berguna. Negara sebagai sebuah institusi legal memiliki tanggung jawab penuh untuk mendasarkan hukum dan keadilan di atas nilai-nilai dan asas-asas kemanusiaan.

1.4.2 Bagi Penulis

Melalui penelitian ini peneliti berusaha untuk mendalami secara baik peran sejarah dalam kaitanya dengan konsep politik diferensiasi dari Iris Marion Young sekaligus menegaskan keterpanggilan peneliti untuk senantiasa terbuka terhadap ketidaksetaraan yang meliputi keunikan dan keistimewaan di dalam masyarakat sebagai manusia yang berkoeksistensi. Dengan tanggung jawab penuh, peneliti akan berusaha untuk memahami dan mendalaminya serta mendaratkannya dalam praktek yang berimplikasi dan mempengaruhi orang lain.

1.4.3 Bagi Fakultas Filsafat

Dengan penelitian ini diharapkan agar setiap mahasiswa/mahasiswi Fakultas Filsafat yang notabene adalah calon-calon pemimpin dan tokoh masyarakat masa depan memahami konsep *politik diferensiasi* sehingga mampu menerapkannya dengan bijaksana dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini disusun dalam tiga bagian. *Pertama*, merupakan bagian pendahuluan. Dalam bagian ini terbagi atas beberapa sub yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. *Kedua*, merupakan landasan teoritis yang berisikan uraian mengenai tema yakni konsep politik diferensiasi menurut Iris Marion Young. Dan di bagian *ketiga*, berisikan metode penulisan dari proposal penelitian ini.